

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**IRFANDI RAIHAN PRATAMA**

**12270513777**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Irfandi Raihan Pratama  
 : 12270512378  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan  
 Kemiskinan

**DISETUJUI OLEH:**

**Dosen Pembimbing**

**Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP.**  
**NIP. 19950618 202012 1 010**

**MENGETAHUI**

**KETUA PROGRAM STUDI**  
**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak**  
**NIP. 19740412 200604 2 002**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dikuasai  
 Nama  
 NIM  
 Program Studi  
 Fakultas  
 Judul

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Irfandi Raihan Pratama  
 : 12270513777  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam  
 Penanggulangan Kemiskinan  
 : 21 April 2026

**Tim Penguji**

**Nama**  
**NIM**  
**Jurusan**  
**Fakultas**  
**Judul Skripsi**  
**Tanggal Ujian**

**Ketua Penguji**  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**Sekretaris**  
Dra. Kafrina, M.Si  
 NIP. 19630810 198803 2 001

**Penguji I**  
Ratna Dewi, Sos., M.Si.  
 NIP. 19811030 200710 2 004

**Penguji II**  
Syed Agung Afandi S.IP., M.IP  
 NIP. 19950618 202012 1 010

*[Handwritten signature]*  
 .....  
*[Handwritten signature]*  
 .....  
*[Handwritten signature]*  
 .....  
*[Handwritten signature]*  
 .....

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shulthani Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa izin penciptanya dan mencantumkan sumber:  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irfandi Raihan Pratama  
 NIM : 12270513777  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang / 16 Januari 2004  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan  
 Kemiskinan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2026  
 Yang membuat pernyataan



Irfandi Raihan Pratama  
 NIM : 12270513777

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

OLEH :

**IRFANDI RAIHAN PRATAMA**  
**12270513777**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kemiskinan di Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan teori peran pemerintah menurut Labolo (2006), yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang dan staf Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial sebagai regulator telah diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan penetapan sasaran program, namun masih terdapat kendala dalam pemutakhiran data. Sebagai dinamisator, Dinas Sosial telah melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat, meskipun partisipasi masyarakat belum maksimal. Sebagai fasilitator, Dinas Sosial menyediakan akses layanan dasar dan bantuan sosial, namun masih terbatas oleh anggaran dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan telah berjalan, tetapi belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

**Kata kunci: Peran Pemerintah, Dinas Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Pekanbaru.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE PEKANBARU CITY SOCIAL SERVICE IN POVERTY ALLEVIATION

BY :

**IRFANDI RAIHAN PRATAMA**  
**12270513777**

This research is motivated by the increasing poverty rate in Pekanbaru City, which indicates that poverty alleviation efforts have not yet been fully optimal. This study aims to identify and analyze the role of the Pekanbaru City Social Service in poverty alleviation based on the theory of government roles according to Labolo (2006), namely as regulator, dynamizer, and facilitator. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of the Head of Division and staff of the Pekanbaru City Social Service as well as social assistance beneficiaries. The results show that the role of the Social Service as a regulator has been realized through the formulation of policies and the determination of program targets; however, there are still obstacles in updating data. As a dynamizer, the Social Service has conducted outreach and assistance to the community, although community participation has not been optimal. As a facilitator, the Social Service provides access to basic services and social assistance, but it is still limited by budget constraints and cross-sector coordination. Thus, the role of the Social Service in poverty alleviation has been implemented, but it has not been optimal in significantly reducing the poverty rate.

**Keywords: Government Role, Social Service, Poverty Alleviation, Pekanbaru.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Kemiskinan” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita dari masa kegelapan menuju era yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan kemajuan peradaban. Berkat perjuangan dan keteladanan beliau, umat Islam dapat menikmati kehidupan yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta kasih sayang. Semoga kita semua senantiasa mampu meneladani akhlak mulia beliau dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun menuntut ilmu demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak yang turut berperan dalam membantu kelancaran penelitian ini.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus, penulis menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Ayah saya, Bapak Irwan Nur Fadli, sosok yang menjadi panutan dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan kasih sayang yang tiada henti. Semangat dan ketulusan ayah dalam mendidik, membimbing serta memotivasi penulis menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang untuk ayah.

Ucapan ribuan terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibunda tersayang, Ibunda Nuri Farisal, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketulusan. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan semangat yang terus mengiringi langkah penulis hingga dapat berada di tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang untuk bunda. Kasih sayang dan pengorbanan ayah serta bunda menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Selain itu, penulis dengan hormat menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr, Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr.Khairil Henry.S.E.,M.Si,Ak selaku Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc selaku Sekretaris Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 8.
8. Bapak Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang bapak dan ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
10. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.

11. Kepada seluruh pegawai kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Aparat dan Masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta sudah dengan sangat baik menerima peneliti hingga peneliti mudah menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada keluarga Administrasi Negara Lokal C Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan dukungan yang telah terjalin selama tujuh semester di bangku perkuliahan. Setiap proses belajar, canda, dan perjuangan bersama telah menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga meskipun kita akan menempuh jalan masing-masing ke depannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis juga dengan senang hati menerima masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan pembelajaran dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga apa yang telah penulis upayakan dapat memberikan kontribusi positif dan membawa kebaikan bagi banyak orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan .....	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI .....	19
2.1 Peran .....	19
2.2 Peran Pemerintah .....	21
2.3 Kemiskinan .....	24
2.4 Penelitian Terdahulu .....	27
2.5 Definisi Konsep .....	29
2.6 Konsep Operasional.....	31
2.7 Kerangka Berpikir .....	32
BAB III.....	33
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Informan Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Analisis Data .....	40
BAB IV .....	42
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	42

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	42
4.2 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	46
BAB V .....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	50
5.1.1 Peran Dinas Sosial sebagai Regulator.....	51
5.1.2 Peran sebagai Dinamisator.....	61
5.1.3 Peran sebagai Fasilitator .....	72
BAB VI .....	81
PENUTUP .....	81
6.1 KESIMPULAN .....	81
6.2 SARAN.....	82
DAFTAR PUSAKA.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru .....	8
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Yang Menganggur Di Kota Pekanbaru .....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 2.2 Indikator Penelitian .....	28
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	33
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Di Kota Pekanbaru .....	40
Tabel 5.1 Data Penerima Program Pkh .....	54
Tabel 5.2 Data Penerima Program Sembako .....	54
Tabel 5.3 Data Kegiatan Penyuluhan Dan Pelatihan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	61
Tabel 5.4 Data Kegiatan Pendampingan Kepada Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	64

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	44
Gambar 5.1 Pemberian Pelatihan Kepada Masyarakat .....	59
Gambar 5.2 Kegiatan Pameran Dan Promosi Produk Umkm .....	59
Gambar 5.3 Kegiatan Pelatihan Bagi Tenaga Tksk Dan Psm .....	64
Gambar 5.4 Pemberian Bantuan Sosial (Sembako) Oleh Dinas Sosial .....	72

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1:1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah tantangan serius yang telah menjadi fokus perhatian dunia selama bertahun-tahun. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan bukan sekadar kekurangan finansial, melainkan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hermawati, 2017). Keberadaan kemiskinan menciptakan lingkungan di mana hak-hak fundamental, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, menjadi sulit diakses oleh sebagian besar penduduk (Almizi & Hermawati, 2018). Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang mencukupi, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memanfaatkan peluang-peluang pembangunan yang seharusnya menjadi hak setiap individu (Rahman, et al., dalam Purwanti, 2023).

Kemiskinan merupakan masalah utama di berbagai negara karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Yunus & Radjab, 2018). Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya negara berkembang sendiri banyak sekali terjadi kemiskinan pada masyarakatnya. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan. Salah satu tolak

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi adalah kemiskinan sendiri (Priseptian & Primandhana, dalam Ni Made Arsita Kusumadewi et al., 2024).

Kemiskinan dapat diartikan suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sulastyawati, dikutip Andina & Wahyudi, 2024). Kemiskinan merupakan suatu momok yang menghantui setiap negara, pasalnya semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan negara tersebut. Menurut Sam Mountford problematika tentang kemiskinan adalah masalah yang sangat krusial dibandingkan masalah lainnya, sehingga untuk mencegah terjadinya kemiskinan atau mengurangi jumlah kemiskinan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar suatu negara tidak mengalami keterbelakangan (Ilmi, dalam Andina & Wahyudi, 2024). Keterbelakangan suatu negara dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi, pemanfaatan sumber daya alam yang kurang maksimal dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan membuat suatu negara mudah dikuasai dan dijajah oleh negara yang lebih maju (Istan, dalam Andina & Wahyudi, 2024).

Pertumbuhan ekonomi bersifat beragam, termasuk berbagai aspek kehidupan masyarakat daripada hanya berfokus pada ekonomi. Suatu bangsa harus mengejar pembangunan ekonomi jika ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warganya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan distribusi pendapatan secara merata (Elia & Marselina, dalam Hardana, 2023).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terus menerus menjadi pembahasan. Menurut Sabarisman dikutip dari (Nazmi & Ajidin, 2024), kemiskinan adalah kondisi kehidupan seseorang yang jauh dari kata sejahtera. Sejahtera merupakan keadaan dimana seseorang telah mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan dasar maupun diluar kebutuhan dasar. Pada negara berkembang kemiskinan disebabkan karena ketimpangan atau ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin yang disebabkan minimnya akses pendidikan dan kesehatan dan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan pembangunan (Itang dalam (Nazmi & Ajidin, 2024). Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan lambatnya proses pembangunan suatu bangsa karena dampaknya yang menyebar dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan. Berbagai program muncul dalam jumlah yang besar dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan telah diimplementasikan di berbagai daerah, namun masalah publik yang terjadi sampai saat ini menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi jumlahnya (Hadna & Kartika dalam Nazmi & Ajidin, 2024).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan ini merupakan salah satu masalah global yang dihadapi berbagai negara berkembang termasuk Indonesia (Bank, dikutip Amanda Septa et al., 2025). Selain itu, negara berkembang juga sering menghadapi masalah, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang tidak merata, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketimpangan kemiskinan di berbagai daerah. Masalah-masalah ini memberikan dampak terhadap tingkat kriminalitas, stabilitas sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi masalah yang perlu diatasi pemerintah (BPS, dikutip Amanda Septa et al., 2025).

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Menurut Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, mengarahkan yang mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memastikan penetapan sasaran dan program integrasi antar kementerian/lembaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dipusatkan pada lokasi-lokasi prioritas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dasar hukum utama yang digunakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang “penyelenggaraan kesejahteraan sosial” dengan 20 bab dan 123 pasal. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai bantuan dan program yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, menetapkan ruang lingkup pelaksanaan kesejahteraan sosial, termasuk : penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dasar (bagi penyandang masalah sosial), pemberdayaan dan perlindungan sosial, (standar pelayanan minimal, pendanaan, serta peran masyarakat).

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023 - 2026 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial salah satunya ialah. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Program Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Pekanbaru, serta bukti bahwa dinas sosial memang bertugas untuk menanggulangi kemiskinan :

1. SIK-NG (Sistem Terpadu)  
Aplikasi layanan terpadu untuk pengaduan & akses bantuan (KIP, KIS, KKS, dll), Menyediakan basis data warga miskin.
2. Pendataan & Prioritas DTKS  
Bantuan hanya untuk warga yang terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3. Program pemberdayaan dan Pelatihan UMKM  
Pelatihan bagi keluarga miskin & disabilitas (menjahit, memasak, bengkel, dll), Diberi alat bantu usaha (kompor, bahan baku, dsb).
4. Pendekatan dan Pendampingan Disabilitas  
Pelatihan dan pembinaan usaha untuk penyandang disabilitas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Peningkatan Kapasitas PSM

Pelatihan bagi Pekerja Sosial Masyarakat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### 6. Penanganan Gelandangan & Pengemis (Gepeng)

Penertiban di lampu merah, Edukasi masyarakat agar tidak memberi di jalan.

#### 7. Program Pemberdayaan Kemiskinan Ekstrem

Pembinaan berbasis keahlian warga miskin ekstrem untuk usaha kecil.

Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya (Adisasmita, 2015 dalam Tsina, 2023).

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah
4. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas
5. Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Kenaikan (%) dari Tahun Sebelumnya
2020	30,40 Ribu Jiwa	-
2021	32,73 Ribu Jiwa	7,66%
2022	35,96 Ribu Jiwa	9,87%
2023	37,67 Ribu Jiwa	4,75%
2024	38,16 Ribu Jiwa	1,30%

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (2025)

Terlihat bahwa meskipun jumlah penduduk miskin terus naik setiap tahun, laju kenaikannya menurun sejak 2022. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sebanyak 32,73 Ribu Jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 35,96 Ribu jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 37,67 Ribu jiwa, dan pada tahun 2024 sebanyak 38,16 Ribu jiwa. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Garis kemiskinan di Provinsi Riau sekitar Rp600.000 – Rp700.000/orang/bulan. Jika seseorang dalam satu keluarga hanya memiliki pengeluaran/pendapatan per orang di bawah angka itu, maka tergolong miskin.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Yang Menganggur Di Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Pengangguran
2019	42.407 Jiwa
2020	47.521 Jiwa
2021	44.503 jiwa
2022	36.513 jiwa
2023	30.661 jiwa

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang menganggur di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sebanyak 44.503 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 36.513 jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 30.661 jiwa, Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menganggur di Kota Pekanbaru setiap tahunnya menurun.

Berdasarkan data BPS, rumah tangga dikategorikan miskin bila memenuhi sekurang-kurangnya 9 dari 14 indikator kondisi hidup tidak layak, yakni: tempat tinggal berlantai tanah/bambu/kayu murahan, dinding dari bahan murah seperti bambu atau tanpa plester, luas lantai <8 m<sup>2</sup>/orang; tidak memiliki jamban sendiri, penerangan non-listrik; sumber air hanya sumur/tanpa pelindung, memasak dengan kayu bakar/arang/minyak tanah, konsumsi daging/ikan/ayam/susu hanya sekali seminggu, hanya mampu membeli satu stel pakaian baru/tahun, frekuensi makan hanya 1–2 kali sehari, tidak mampu biaya berobat ke puskesmas/poliklinik, kepala keluarga berpendidikan ≤SD atau tidak sekolah, mata pencaharian sebagai petani kecil (<0,5 ha), buruh tani/nelayan/perkebunan/bangunan/penghasilan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

< Rp 600.000 per bulan, dan tidak memiliki tabungan atau aset mudah dijual senilai  $\geq$  Rp 500.000 (sepeda motor, emas, ternak, dsb). Bila rumah tangga memenuhi minimal 9 dari 14 indikator ini, maka dinyatakan miskin dan layak menerima bantuan sosial.

Di Kota Pekanbaru, implementasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melibatkan penetapan batas kemiskinan ekstrem Rp 322.000 per kapita per bulan dengan argumentasi komposisi keluarga 5 orang sebagai salah satu kriteria menentukan penerima bantuan sosial. Per Januari 2025, jumlah keluarga di bawah kriteria tersebut tercatat 708 KK. Statistik terbaru dari BPS Kota Pekanbaru (Maret 2023) menunjukkan tingkat kemiskinan 3,16%, meningkat dari 3,06% di Maret 2022, yang setara dengan sekitar 37.673 jiwa miskin. Pemerintah kota pun melakukan pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dengan jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin mencapai sekitar 245.587 jiwa (November 2024) dan 243.509 jiwa (Juli 2024)

Kota Pekanbaru, yang merupakan ibu kota Provinsi Riau, saat ini tengah berjuang menghadapi masalah kemiskinan yang semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada upaya untuk meningkatkan perekonomian, tingkat kemiskinan di kota ini justru mengalami kenaikan. Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan meningkat sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa meskipun sektor ekonomi menunjukkan tanda-tanda perbaikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Salah satu gejala yang paling mencolok dari kemiskinan di Pekanbaru adalah tingginya

angka putus sekolah. Banyak anak-anak di kota ini yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka di usia dini. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Akibatnya, generasi muda yang seharusnya menjadi harapan masa depan kota ini justru terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Lingkungan yang tidak mendukung juga turut berkontribusi pada masalah kemiskinan. Banyak daerah di Pekanbaru yang masih minim infrastruktur, seperti jalan yang tidak layak, akses listrik yang terbatas, serta kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Masyarakat yang tinggal di wilayah seperti ini sering kali merasa terasing dan sulit untuk mengakses layanan dasar yang seharusnya mereka dapatkan (Fahri, 2024)

Dampak kemiskinan di Pekanbaru tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Salah satu dampak yang signifikan adalah penurunan kualitas tenaga kerja. Dengan banyaknya anak yang putus sekolah, kualitas sumber daya manusia di Pekanbaru menurun drastis. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing di pasar kerja, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota. Kemiskinan juga meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat. Banyak keluarga yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, banyak orang tua yang terpaksa bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini menciptakan tekanan ekonomi yang berat dan mempengaruhi kesehatan serta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan mental mereka. Di sisi lain, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketidakmampuan masyarakat untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan layanan kesehatan, kualitas hidup mereka akan terus menurun, dan mereka akan semakin sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan (Etania Ranu Andhika, 2024).

Kota Pekanbaru hingga tahun 2024 masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,15% (nilai ini hanya turun tipis dari 3,16% pada 2023), mencerminkan minimnya peningkatan dalam pengentasan kemiskinan. Lebih dari itu, terdapat sekitar 3.926 jiwa atau ±708 kepala keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem—termasuk kesulitan akses terhadap pangan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal layak, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Sosial telah mengalokasikan dana senilai Rp 1,76 miliar melalui dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga sumbangan CSR dan lembaga zakat, namun upaya tersebut hanya menjangkau sebagian dari total keluarga miskin ekstrem. Selain masalah ekonomi, faktor struktural seperti kurangnya keterampilan, terbatasnya akses modal usaha, dan minimnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan selama ini belum cukup efektif, dan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, serta berbasis pemberdayaan bagi warga miskin dan rentan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Indonesia memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah saat ini melaksanakan berbagai program yang terintegrasi, termasuk program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha kecil. Program-program ini dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Djein Natasya Rauf et al., 2023).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan itu, maka telah diprogramkan beberapa program sosial demi terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan perumahan) masyarakat miskin. Dalam hal ini, Dinas SosialDinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial terbagi menjadi 2, yaitu Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten atau Kota. Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sedangkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. Dinas sosial dipimpin oleh kepala dinas, dinas sosial mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Zai et al., 2021 dalam(Dinas et al., 2024).

Dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perangkat pemerintah daerah, dinas sosial bertugas mengidentifikasi, mendata, dan

memverifikasi kelompok masyarakat rentan, seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak-anak yang membutuhkan perlindungan, serta kelompok marginal lainnya. Dinas sosial kemudian menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, baik berupa bantuan tunai, bantuan pangan, maupun layanan sosial lainnya, agar tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, dinas sosial juga berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha mikro dan kecil, serta pengembangan program kewirausahaan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, dinas sosial juga mengembangkan pendekatan berkelanjutan melalui program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan komunitas. Hal ini dilakukan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, serta kurangnya keterampilan. Dalam pelaksanaannya, dinas sosial menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal, guna menciptakan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi ini penting agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Peran dan fungsi dinas sosial tersebut diperkuat oleh landasan hukum yang jelas dan komprehensif. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara khusus mengatur kebijakan dan program penanganan fakir miskin, mulai dari pendataan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat miskin. Ketentuan ini memberikan arah yang jelas bagi dinas sosial dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan pedoman teknis mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang harus dilakukan, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah melalui dinas sosial memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab langsung dalam menangani kemiskinan di wilayahnya. Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, peran dinas sosial menjadi semakin kuat, terarah, dan memiliki legitimasi yang jelas dalam menyusun serta melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, dinas sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan didukung oleh regulasi yang kuat, dinas sosial

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka penulis memiliki alasan yang kuat untuk mencoba melakukan penelitian ini. Dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Kemiskinan”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang dimiliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Bagi ilmu pengetahuan hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam usaha-usahanya menanggulangi angka kemiskinan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti persoalan yang sama.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini menguraikan tentang-tentang Deskripsi Teori, penelitian terdahulu, definisi konsep, serta kerangka berpikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini meliputi Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai Lokasi penelitian, seperti sejarah objek penelitian , aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dan lain sebagainya

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan guna menjawab pertanyaan dan pengujian

**BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Peran

Dalam konteks penelitian ini, peran didefinisikan berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Peran merujuk pada fungsi atau tugas yang diberikan oleh individu dalam suatu kelompok atau organisasi, yang mencakup tanggung jawab dan harapan yang melekat pada posisi tersebut. Selain itu, peran juga dapat diartikan sebagai karakter atau tokoh yang diperankan oleh seorang aktor dalam teater pertunjukan, yang menunjukkan bagaimana individu beradaptasi dengan norma dan ekspektasi sosial. Dalam penelitian ini, pemahaman tentang peran akan digunakan untuk menganalisis kontribusi individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan, serta bagaimana peran tersebut mempengaruhi interaksi dan dinamika dalam kelompok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya peran dalam membentuk struktur sosial dan organisasi.

Menurut Abu Ahmadi (dikutip dari Herlina et al., 2017) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda et al., 2017), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (dikutip dari, Lantaeda et al., 2017) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif, Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif, Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif, Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian menurut Riyadi (dalam Lantaeda et al., 2017) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Peran Pemerintah

Talidzu Ndraha (2011) peran pemerintah adalah “proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji, Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service, untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya dan Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab. Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) “peran pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan”. (Putri, 2021)

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam Bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang termuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antar orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, banyak yang bisa dilakukan olehnya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003).

Ernaya Suradinata dalam farunnisa (2017) mendefinisikan pemerintah sebagai Lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi melakukan Upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Apter dalam farunnisa (2017) pemerintah adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan (exercising power).

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (dikutip Prasojo & Fauziah, 2015) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yakni:

1. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan.
2. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Labolo (2006) fungsi pemerintahan dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun Masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada Masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi Masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses Pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika Pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada Masyarakat. biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan Masyarakat dalam mengoptimalkan Pembangunan daerah. Peran pemerintah dapat dianggap sebagai harapan dari individu atau kelompok terhadap seseorang yang memegang posisi atau jabatan sosial. Sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan, peran pemerintah harus mencakup tanggung jawab akan perubahan yang terjadi, baik dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun masyarakat itu sendiri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah perlu memiliki pemikiran kreatif dan logis agar dapat memaksimalkan pelaksanaan sistem pemerintahan. Terciptanya pemerintahan yang efektif tentunya berasal dari kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

### 2.3 Kemiskinan

Kemiskinan ialah masalah utama negara pembangunan termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan serius, kreatif, menyeluruh dan berkesinambungan. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan serius yang sampai saat ini sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan (Nurwati, 2008 Sahni et al., 2017).

Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negaranegara yang “miskin” (Criswardani Suryawati, dikutip dari Herlina et al., 2017)

Menurut teori kemiskinan struktural, kemiskinan terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Todaro, 2015). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu memperbaiki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi tersebut melalui program-program sosial dan ekonomi.(Amelia et al., 2025)

### 2.3.1 Macam macam Kemiskinan

Lain halnya menurut Sumodiningrat (dalam Herlina et al., 2017) yang mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki beberapa macam, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan absolut apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis kemiskinan” atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
4. Kemiskinan struktural kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.2 Penyebab Kemiskinan

Terdapat 3 faktor penyebab kemiskinan ( Kuncoro dalam(Amelia et al., 2025) yaitu :

1. Ketimpangan Distribusi Sumber Daya Kemiskinan secara makro disebabkan oleh perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Masyarakat miskin sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya yang berkualitas, sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan ini mengakibatkan sebagian besar populasi terjebak dalam kemiskinan.
2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang minim, yang berdampak pada produktivitas yang rendah dan upah yang kecil. Individu dengan SDM yang rendah sulit bersaing di pasar kerja, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan.
3. Ketidaksamaan Akses dan Modal Ketidaksamaan akses terhadap modal dan sumber daya juga memperburuk kondisi kemiskinan. Banyak individu mengalami kegelisahan yang membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup. Keterbatasan ini menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak dapat meraih peluang kerja yang lebih baik.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Darpin Et Al., 2022	Analisis Peran Puskesmas Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Fokus Pada Puskesmas: Layanan Sosial, Advokasi (Kurang Optimal), Aksesibilitas, Dan Informasi.	Penelitian Irfandi Fokus Pada Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Bukan Puskesmas Dan Mencakup 3 Peran Utama Pemerintah (Regulator, Fasilitator, Dinamisor).
2	Azizah & Prathama, 2024	Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan PKH Di Desa Sumber kepuh	Peran Sebagai Fasilitator, Edukator, Teknisi, Berhasil Meningkatkan Kualitas Hidup Penerima Bantuan.	Penelitian Azizah Fokus Pada Satu Program (PKH) Di Desa; Sedangkan Penelitian Irfandi Membahas Peran Dinsos dalam menanggulangi

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				kemiskinan Di Wilayah Kota.
	Rohyadi Et Al., 2024	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Strategi: Perlindungan Keluarga, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi.	Penelitian Irfandi Lebih Fokus Pada Peran Pemerintah (Dinsos), Bukan Pada Strategi Pemberdayaan Langsung Ke Masyarakat.
4	Yusnike & Natalya, 2023	Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Program Bantuan, Pelatihan, Layanan Dasar, Tantangan Anggaran Dan Koordinasi Lembaga.	Penelitian Irfandi Lebih Mendalam Dalam Aspek Kebijakan Lokal (Perwako, Perda, RPJMD) Dan Menggunakan Pendekatan Teori Peran Pemerintah.
5	Supriyatno & Maulana, 2022	Implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang	Perda Belum Efektif: Salah Sasaran, Distribusi Tidak	Penelitian Irfandi tidak Membahas Implementasi Kebijakan Lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Bekasi	Merata, Sosialisasi Minim.	Namun Fokus Pada Peran Instansi Pelaksana (Dinsos), Bukan Hanya Efektivitas Perda.
--	--	----------------------------	--

## 2.5 Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah gambaran dari suatu objek, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan akal untuk memahami hal lain. Konsep menurut Soedjad adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan dan biasanya dinyatakan dengan istilah atau kumpulan kata. Tanwif menjelaskan bahwa konsep adalah gagasan yang menggambarkan hubungan antara dua fakta atau lebih, seperti “memahami kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal seperti sandang, keamanan, pendidikan, cita-cita dan harga diri. (Effendy et al., 2023).

### 1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (dalam (Lantaeda et al., 2017), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga. Sedangkan menurut Gibson In Vancevich dan Donnelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

### 2. Peran Pemerintah

Talidzu Ndraha (2011) peran pemerintah adalah “proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji, Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service, untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya dan Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.”(Putri, 2021)

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan ialah masalah utama negara pembangunan termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan serius, kreatif, menyeluruh dan berkesinambungan. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan serius yang sampai saat ini sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan (Nurwati, dalam Sahni et al., 2017).

## 2.6 Konsep Operasional

**Tabel 2.2 Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Peran Pemerintah	Regulator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Kebijakan Dan Regulasi</li> <li>- Penetapan Sasaran Program</li> <li>- Perumusan Program</li> </ul>
	Dinamisator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Penyuluhan Atau Pelatihan Bagi Masyarakat</li> <li>- Pendampingan Kepada Masyarakat</li> <li>- Dorongan Partisipasi Masyarakat</li> </ul>
	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Akses Layanan Dasar</li> <li>- Fasilitas Terintegrasi</li> <li>- Dukungan Infrastruktur</li> </ul>

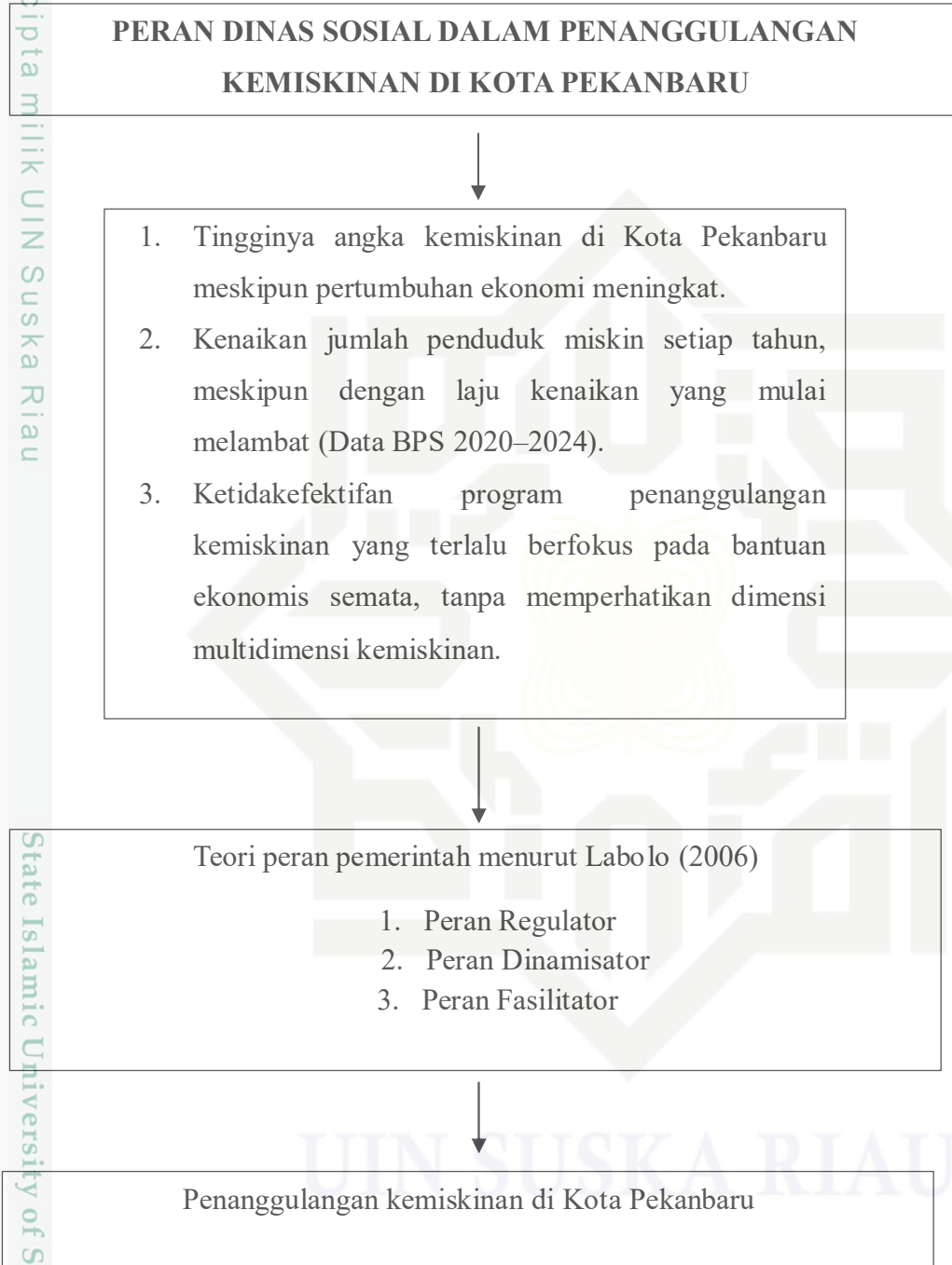
### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian ini menekankan pada data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta berfokus pada proses dan interpretasi daripada hasil yang dapat digeneralisasi.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki keunggulan dalam memahami makna dan pengalaman subjek secara mendalam serta kontekstual. Pendekatan ini sangat berguna ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena sosial, perilaku, atau proses yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan secara memadai hanya dengan data kuantitatif atau angka. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan temuan yang muncul selama proses berlangsung. Selain itu, pendekatan ini sangat efektif untuk menggali fenomena baru yang belum banyak diketahui atau dibahas, sehingga dapat membuka wawasan baru serta menemukan variabel-variabel penting yang selama ini belum teridentifikasi. Dalam konteks sosial dan budaya, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana latar belakang lingkungan dan budaya memengaruhi pandangan dan perilaku individu, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kaya dan bermakna. Data yang diperoleh

melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi naratif dapat dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, metode kualitatif sangat cocok digunakan ketika tujuan penelitian adalah memahami “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi, bukan hanya “berapa banyak” atau “seberapa besar” seperti pada pendekatan kuantitatif.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, dengan fokus utama pada Dinas Sosial sebagai lokasi penelitian. Dinas Sosial dipilih sebagai titik penelitian karena merupakan instansi pemerintah yang secara langsung menangani dan mengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Pekanbaru. Melalui Dinas Sosial, berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kurang mampu dapat diakses, dianalisis, serta dievaluasi secara lebih mendalam. Lokasi ini menjadi sangat strategis karena menjadi pusat koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang valid serta komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan, yakni mulai dari bulan Mei hingga Agustus. Rentang waktu ini dipilih agar peneliti dapat melakukan observasi, pengumpulan data, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai peran tersebut. Selain itu, periode tersebut juga memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika dan perubahan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi secara bertahap, baik dari sisi program yang dijalankan maupun dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, durasi penelitian yang cukup panjang ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam, sekaligus mempermudah analisis terhadap keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan, pemilihan lokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan waktu penelitian yang terjadwal secara sistematis ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi riil pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi yang tepat sasaran bagi peningkatan ekonomi masyarakat di kota tersebut.

### 3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Kemiskinan" ini, informan dipilih secara purposive untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Informan utama dalam penelitian ini meliputi beberapa pihak yang memiliki peran strategis dan pengetahuan mendalam mengenai kebijakan serta pelaksanaannya, antara lain:

Dengan pemilihan informan yang representatif tersebut, diharapkan penelitian dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan berjalan dan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	1 Orang
2	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	1 Orang
3	Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Sosial	3 Orang
4	Masyarakat Miskin Tidak Penerima Bantuan Sosial	1 Orang
5	Masyarakat Penerima Pelatihan	1 Orang
	Total	7 Orang

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Pendit 1992, dikutip (Ati et al., n.d.), data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Ralston dan Reilly Chamidi, 2004: 314 dikutip (Ati et al., n.d.), data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata, data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aktivitas mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi langkah yang penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan instrumen penelitian yang valid sangat berperan dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan (Saefuddin et al. 2023 dalam Putra, 2025)). Ada tiga cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Observasi (Pengamatan) menurut Gray (2004) yang dikutip oleh Sobry dan Prosmala, observasi dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang mengandalkan penginderaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan mampu mendeskripsikan setting penelitian, orang, kejadian, peristiwa dan makna-makna yang disampaikan oleh partisipan (informan) mengenai hal-hal tersebut. (Sutikno dan Hadisaputra 2020). Jika dalam dunia pendidikan, maka langkah observasi yang dilakukan adalah seorang peneliti pergi langsung ke sekolah untuk mengamati. Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta di lingkungan masyarakat, khususnya pada kelompok penerima dan non-penerima bantuan sosial. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Fokus observasi diarahkan pada peran Dinas Sosial sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, dengan mengamati bagaimana kebijakan dijalankan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan, serta bagaimana bantuan sosial dan layanan diberikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pegawai, proses penyaluran bantuan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dicatat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk catatan lapangan dan didukung dengan dokumentasi. Selanjutnya, hasil observasi diverifikasi dengan data dari wawancara dan dokumen resmi untuk memastikan keakuratan data. Setelah itu, data dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu dteknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka baik bertemu secara langsung ataupun tidak dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data (Trivaika dan Senubekti 2022). Jika dalam dunia pendidikan, maka langkah wawancaranya adalah peneliti menemui guru ataupun siswa kemudian memberikannya pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian, misalnya seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya (Yusra, Zulkarnain, dan Sofino 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.6 Analisis Data

Analisis data adalah tahapan terpenting dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, data-data yang berceceran atau berserakan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak dianalisis dengan baik dan benar. Dapat dikatakan bahwa data-data berserakan tersebut layaknya bahan mentah yang harus diolah menjadi barang jadi dan bermanfaat. Maka dalam proses analisis, data diatur, diseleksi, diklasifikasikan dan diolah sehingga benar-benar menjadi data yang dapat menjawab permasalahan penelitian (Putra, 2025). Analisis data adalah proses pengolahan dan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan menemukan pola, hubungan, atau informasi penting yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Analisis ini melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sugiyono, 2017)

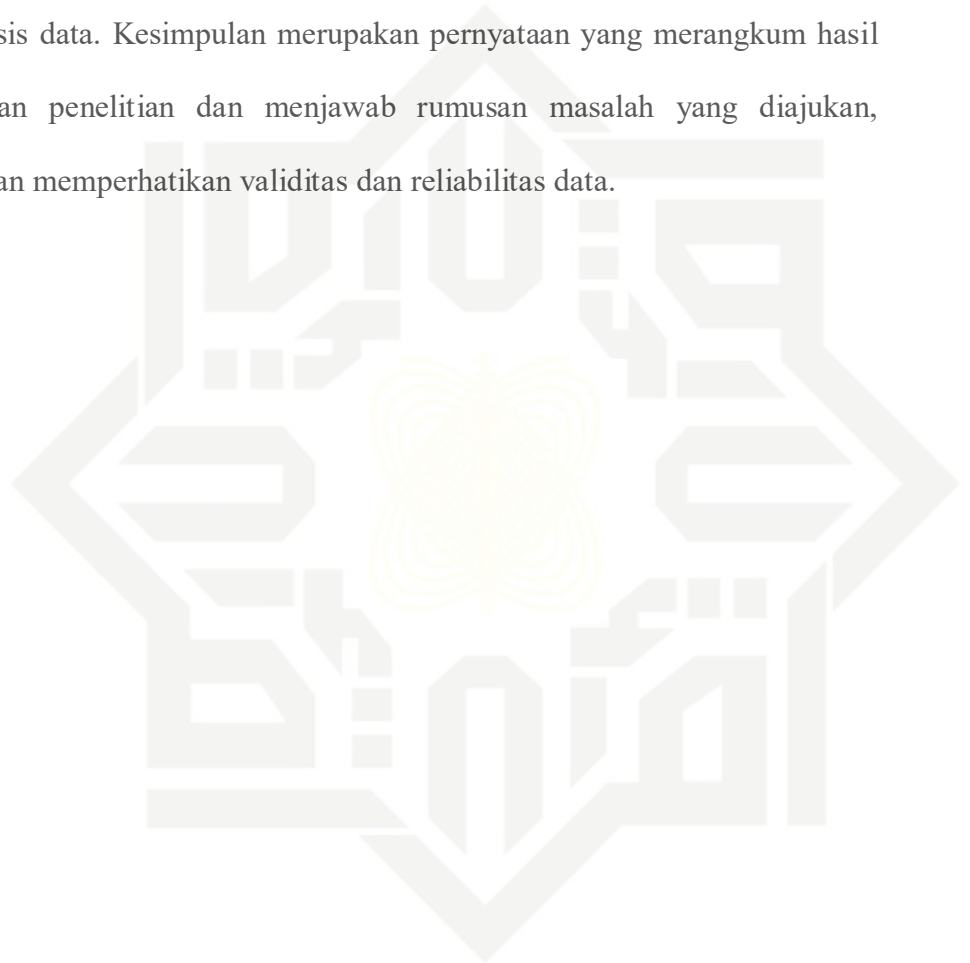
1. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data yang bertujuan untuk memudahkan analisis dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyaring data sehingga hanya data yang relevan dan penting yang akan dianalisis lebih lanjut. Proses ini membantu mengelola volume data yang besar sehingga analisis menjadi lebih efektif dan efisien. (Miles & Huberman, 1994, dikutip Miles et al., n.d.)
2. Menurut Sugiyono (2018, dalam Sugiyono, n.d.) penyajian data adalah proses pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, atau uraian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naratif. Penyajian ini berfungsi agar hasil penelitian dapat terlihat jelas dan mudah dianalisis lebih lanjut.

3. Menurut Sugiyono (2017 ,dalam Sugiyono, n.d.) penarikan kesimpulan adalah proses akhir dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan merupakan pernyataan yang merangkum hasil temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diajukan, dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas data.



UIN SUSKA RIAU



Selama masa kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang, Pekanbaru terus berkembang karena posisi strategisnya. Setelah kemerdekaan, status Pekanbaru ditingkatkan secara bertahap, dan puncaknya pada 20 Januari 1959, kota ini secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, menggantikan Tanjungpinang. Perkembangan ini mendorong dilakukannya perluasan wilayah administratif secara signifikan untuk mendukung perannya sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan. Pekanbaru dikenal memiliki laju pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi, mencerminkan pesatnya geliat perekonomian. Perekonomian kota ini didominasi oleh sektor perdagangan besar, eceran, jasa kemasyarakatan, dan konstruksi. Selain itu, Pekanbaru juga memainkan peran krusial dalam industri pertambangan minyak bumi di Riau.

Kondisi demografi Pekanbaru bersifat kosmopolitan. Kota ini dihuni oleh beragam etnis yang datang dari berbagai daerah, dipengaruhi oleh statusnya sebagai pusat perdagangan dan jasa. Etnis-etnis yang memiliki populasi signifikan antara lain adalah Melayu (sebagai tuan rumah dan pemegang kebudayaan), Minangkabau, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Pluralitas ini menciptakan corak sosial budaya yang dinamis dan mendukung visi kota sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )
1	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
2	Lima Puluh	Rintis	4,04
3	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
4	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55
5	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
6	Rumbai	Sri Meranti	61,86
7	Rumbai Barat	Maharani	86,01
8	Rumbai Timur	Limbangan	138,31
9	Sail	Cinta Raja	3,26
10	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
11	Sukajadi	Pulau Karam	3,76
12	Tuah Madani	Tuah Madani	29,84
13	Binawidya	Simpang Baru	36,59
14	Kulim	Mentagor	56,87
15	Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40

Sumber : Dinas Sosia & BPS Kota Pekanbaru 2025

#### 4.1.2 Kondisi Geografis dan Topografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatra. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi yang strategis karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di

Provinsi Riau. Keberadaan Sungai Siak yang membelah wilayah kota memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan transportasi masyarakat. Secara astronomis, Kota Pekanbaru terletak pada koordinat  $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$  Lintang Utara dan  $101^{\circ}14' - 101^{\circ}34'$  Bujur Timur. Letaknya yang berada di wilayah ekuator menyebabkan Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara yang relatif tinggi serta curah hujan yang cukup besar sepanjang tahun. Secara administratif, Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak di sebelah utara dan timur, serta Kabupaten Kampar di sebelah selatan dan barat. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Pekanbaru sebagai daerah penghubung antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman di Provinsi Riau.

Secara topografis, Kota Pekanbaru merupakan wilayah dataran rendah dengan permukaan tanah yang relatif datar hingga landai. Ketinggian wilayah Kota Pekanbaru berkisar antara 5–50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi topografi tersebut menyebabkan sebagian wilayah Kota Pekanbaru berpotensi mengalami genangan air, terutama pada saat musim hujan. Jenis tanah di Kota Pekanbaru didominasi oleh tanah aluvial dan tanah gambut, khususnya pada wilayah yang berada di sekitar aliran Sungai Siak dan daerah pinggiran kota. Tanah aluvial merupakan hasil endapan sungai yang relatif subur, sedangkan tanah gambut memiliki daya dukung yang rendah sehingga memerlukan penanganan khusus dalam pembangunan infrastruktur.

Topografi yang relatif datar memberikan kemudahan dalam pengembangan permukiman, jaringan transportasi, dan kegiatan perekonomian. Namun demikian,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi tersebut juga menuntut adanya perencanaan tata ruang dan sistem drainase yang baik guna meminimalkan risiko banjir dan permasalahan lingkungan.

## 4.2 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sejarah terbentuknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah sosial di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan masih terus berlangsung karena Belanda berusaha kembali menjajah. Dalam situasi perang tersebut, banyak rakyat yang mengungsi, dan muncul para relawan yang membantu dengan mendirikan dapur umum, menyalurkan logistik, serta memberikan dukungan kepada para pejuang dan pengungsi. Dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial inilah kemudian lahir Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada 22 Desember 1947, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Departemen Sosial Republik Indonesia.

Pada tahun 1947 pemerintah membentuk Inspeksi Sosial yang bertugas membantu tentara dan korban perang. Lembaga ini kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial pada tahun 1950 dengan tugas pokok membantu korban perang dan para veteran. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 1965, tugas Jawatan Sosial diperluas untuk menangani penyandang cacat, tenaga kerja Indonesia, serta organisasi sosial. Tahun 1974, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia, yang memiliki struktur hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Departemen ini berperan penting dalam



perlindungan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1999, Departemen Sosial sempat dibubarkan dengan alasan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Namun, meningkatnya berbagai permasalahan sosial seperti bencana alam, anak jalanan, dan kemiskinan membuat pemerintah kembali membentuk lembaga baru bernama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN). Karena efektivitas BKSN masih terbatas, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001, Departemen Sosial diaktifkan kembali dengan nama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu, di tingkat daerah, setelah pembubaran Departemen Sosial Kota Madya Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001. Lembaga ini menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemakaman. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bidang sosial sebagai urusan wajib pemerintahan, maka urusan pemakaman dipisahkan dari urusan sosial. Melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Sosial dan Pemakaman secara resmi berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang berfungsi penuh melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. (Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025).

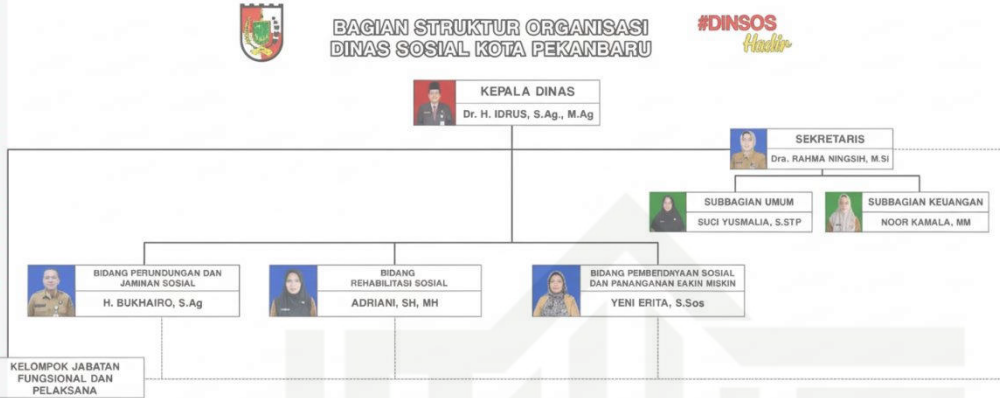
#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Strukur Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Tugas-tugas ASN Dinas Sosial :

### Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyebar luasan nilai-nilai kepehlawanan, dan restorasi sosial.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengkoordinasi, membina, merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
6. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian berjudul “*Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Kemiskinan*” dengan pendekatan kualitatif, disimpulkan bahwa Dinas Sosial menjalankan tiga peran utama pemerintah menurut Labolo (2006), yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, efektivitasnya masih belum optimal sehingga belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru terus meningkat dan mencapai 38,16 ribu jiwa pada tahun 2024, yang menandakan masih adanya kendala dalam penanggulangan kemiskinan.

Sebagai regulator, Dinas Sosial telah menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan serta regulasi, seperti Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023, Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang DTKS, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Penetapan sasaran program dilakukan melalui verifikasi dan validasi DTKS. Namun, data kemiskinan dinilai belum sepenuhnya akurat akibat dinamika sosial ekonomi serta rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan, sehingga berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

Sebagai dinamisator, Dinas Sosial melaksanakan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan melalui program pelatihan UMKM dan keterampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas. Namun, pelatihan tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi karena tidak diikuti dengan dukungan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan jumlah TKSK dan PSM menyebabkan pendampingan belum berjalan optimal, terutama bagi keluarga miskin ekstrem.

Sebagai fasilitator, Dinas Sosial menyediakan akses terhadap bantuan sosial dan layanan dasar seperti BPJS PBI, PKH, dan BPNT, serta mengembangkan sistem digital SIK-NG untuk pengelolaan data kemiskinan. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut masih terkendala oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur sosial seperti perumahan layak, sanitasi, dan pendidikan di beberapa wilayah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, daya beli, serta keterbatasan fasilitas sosial. Oleh karena itu, meskipun Dinas Sosial telah menjalankan perannya, diperlukan peningkatan efektivitas program melalui optimalisasi data, penguatan pendampingan, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pekanbaru.

### 1. Akurasi dan pematkhiran DTKS

Dinas Sosial perlu meningkatkan kualitas pendataan DTKS melalui proses verifikasi dan validasi yang lebih ketat, berkelanjutan, dan partisipatif

dengan melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, serta kelurahan. Musyawarah kelurahan perlu dilaksanakan secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengusulan data. Selain itu, sosialisasi pemanfaatan sistem digital seperti SIK-NG perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami mekanisme pengaduan dan pembaruan data secara mandiri, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

2. Penguatan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan

Program pelatihan keterampilan perlu disertai dengan intervensi lanjutan berupa bantuan modal usaha, pemberian alat kerja, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Dinas Sosial juga perlu menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga keuangan mikro, serta pihak swasta melalui program CSR agar hasil pelatihan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

3. Peningkatan pendampingan dan sinergi lintas sektor

Pendampingan oleh TKSK dan PSM perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas agar mampu menjangkau keluarga miskin secara lebih intensif. Di samping itu, Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan, serta lembaga zakat dan sosial lainnya. Sinergi ini penting untuk menangani kemiskinan secara komprehensif mengingat permasalahan kemiskinan bersifat multidimensi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui saran-saran tersebut, diharapkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efektivitas perannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam memperbaiki arah kebijakan di masa depan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSAKA

- Amanda Septa, Arista Fairuzani, Camila Yasmin, Giga Hutagaol, & Vanny Hutabarat. (2025). Analisis Variabel Kemiskinan di Indonesia dengan Model Linear Regresi dan Algoritma K-Means pada Tahun 2020-2023. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 28–52. <https://doi.org/10.58192/profit.v4i2.3077>
- Amelia, N., Oktarahmadini, S., & Harahap, A. (2025). *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan*. 1–23. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i1.76>
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>
- Ati, D. S., Si, M., Kistanto, N. H., Taufik, M. A. A., & Sos, S. (n.d.). *Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*.
- Dinas, P., Dalam, S., Kemiskinan, M., Kecamatan, D., Helvetia, M., & Daulay, S. K. (2024). The Role of Social Services in Handling Poverty in Medan Helvetia District. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 3(1), 59–69.
- Dinas Sosial Kota Pekanbaru. (2025, October 14). *Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. © 2025 Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Djein Natasya Rauf, Weny Almoravid Dunga, & Nuvazria Achir. (2023). *PERAN DAN TANTANGAN DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN BULANGO TIMUR*.
- Effendy, E., Aisyah, N., Manurung, R. S., & Nasution, R. (2023). *Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi* (Vol. 5).
- Etania Ranu Andhika. (2024, July 5). *Menilik Angka Kemiskinan di Provinsi Riau*. GoRiau. <https://www.goriau.com/berita/baca/menilik-angka-kemiskinan-di-provinsi-riau.html>
- Fahri. (2024, March 1). *Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru Meningkatkan Tiga Persen, Ade Hartati : Harus Diselesaikan Secara komprehensif!* RIAUAKTUAL. <https://riauaktual.com/news/detail/94547/tingkat->



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan-di-kota-pekanbaru-meningkat-tiga-persen-ade-hartati--harus-diselesaikan-secara-ko

Hardana, A. (2023). Hubungan antara Kemiskinan dan Pendidikan di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 7–19. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>

Herlina, N., Dan, M. H., & Komariah, M. (2017). *Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis* (Vol. 5, Number 2).

Labolo, M. (2017). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 04(048).

Miles, M. B., Huberman, • A Michael, & Saldaña, J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*.

Nazmi, F., & Ajidin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Payakumbuh. *Journal Publicuho*, 7(3), 1135–1143. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468>

Ni Made Arsita Kusumadewi, Miftahul Hariz, & Muhammad Yasin. (2024). Analisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 27–37. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2533>

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020, December 17). *Kota Pekanbaru*. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>.

Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*.

Purwanti, E. (2023). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1–10.

Putra, E. M. (2025). KONSEP UMUM PENELITIAN KUALITATIF PADA RANAH PENDIDIKAN. *Dahzain Nur*, 15(1), 10–17. <https://doi.org/10.69834/dn.v15i1.282>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri, D. A. (2021). *Peranan Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Margomulyo Di Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan*. 2021(2), 171–184.
- Sahni, P., Haruna, S., Mappamiring, M., & Yusuf, M. (2017). *Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tana Toraja*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Tsina, F. (2023). *Kriteria Kemiskinan Masyarakat Desa Pesisir dan Masyarakat Desa Dataran Tinggi yang Sulit Ditentukan*.

## DOKUMENTASI

Wawancara penelitian bersama ibu Yeni Erita S.Sos. Selaku kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 4 november dan 28 november 2025



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara penelitian bersama ibu Tanti Halomongan selaku kepala seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 4 november dan 28 november 2025



Wawancara dengan ibu santi selaku masyarakat penerima pelatihan oleh dinas sosial, 28 November 2025



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan ibu Wulan dan Mirna selaku masyarakat yang mendapatkan bantuan, 28 November 2025



Wawancara dengan bapak Kasim selaku masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, 28 November 2025



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Rahmat selaku masyarakat, 28 November 2025



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*



Irfandi Raihan Pratama, lahir pada tanggal 16 Januari 2004 di Bangkinang. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara dari Ayah yang bernama Irwan Nur Fadli dan Ibu bernama Nuri Farisal. Penulis bersuku Melayu, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, serta dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pendidikan formal penulis dimulai pendidikan formal penulis

dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 010 Kubu Babussalam dan berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Al- Washliyah Kubu Babussalam dinyatakan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK TARUNA SATRIA pada tahun 2020. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi publik, manajemen organisasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik dalam memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka menunjang proses pembelajaran, Penulis berkesempatan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BAPPEDA, Provinsi Riau. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Melalui kegiatan tersebut, penulis turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis dinyatakan lulus pada Ujian Munaqasah pada tanggal 21 April 2026 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Hk Ciri Diilung Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan harus selalu disertai sumber yang jelas, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS SOSIAL

Jl. Datuk Setia Maharaja No.6 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya  
Pekanbaru Telp. (0761) 22602

Kode Pos 26126

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B.400.14.5.4/DINSOS-DAYASOS/003 /2025

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IRFANDI RAIHAN PRATAMA**  
 NIM : 12270513777  
 Fakultas/Jurusan : Administrasi Negara  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian dan Selesai di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai Rekomendasi Penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :B-6635/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025 Tanggal 16 Oktober 2025.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, November 2025

An.KEPALA DINAS SOSIAL  
 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 DAN PFM



YENI PERITA, S.Sos  
 NIP.19710101 199203 2 003

Tembusan

Yth : Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.